

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keberlanjutan semakin krusial dalam suatu perusahaan karena mereka berusaha untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Bentuk pelaporan ini tidak hanya membantu perusahaan untuk menunjukkan praktik-praktik keberlanjutan mereka, tetapi juga memberikan informasi berharga bagi investor dan para pihak yang berkepentingan. Dengan menggunakan informasi ini, pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja perusahaan di bidang-bidang tersebut dan membuat keputusan yang tepat terkait investasi atau kerja sama mereka dengan perusahaan. Perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pelaporan keberlanjutan dianggap lebih baik oleh investor dan pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan melalui pelaporan tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan pada akhirnya berkontribusi pada nilai jangka panjangnya.

Isu lingkungan juga telah menjadi fokus utama di dunia saat ini yang disebabkan oleh perubahan iklim, pemanasan global dan polusi udara. Salah satu negara yang terdampak akan isu lingkungan adalah Indonesia terkhusus di kota Jakarta. Pada tahun 2023, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) salah satu penyebab polusi udara yang terjadi di Ibu Kota dikarenakan kegiatan industri berbasis batubara (BBC, 2023). Oleh karena itu, KLHK melakukan penghentian kegiatan dari perusahaan yang telah menyebabkan

terjadinya polusi udara, yaitu PT Pindo Deli 3, PT Unitama Makmur Persada, PT Maju Bersama Sejahtera dan PT Wahana Sumber Rezeki. Adapun keempat perusahaan dihentikan karena tidak mengikuti regulasi dan teknis dalam keberlanjutan sehingga mencemari lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitar (BBC, 2023). Penghentian kegiatan industri oleh KLHK merupakan langkah penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, meskipun dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi perusahaan-perusahaan terkait. Langkah-langkah berkelanjutan dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan lingkungan di masa depan.

Perkembangan zaman membuat isu tersebut menjadi lebih transparansi sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang terlibat sehingga membuat reputasi perusahaan menjadi terpengaruh. Hal ini membuat para pelaku bisnis saat ini tidak hanya berfokus mencari profit semata tetapi juga memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan strategi bisnis yang berkelanjutan atau *sustainable* (Rezaee & Fogarty, 2019). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan *signal* positif bagi reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, sesuai dengan *signaling theory*. Kemudian, dari segi *stewardship theory*, perusahaan juga mengakui tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya dan kegiatan bisnis berkelanjutan, dari segi perusahaan ataupun dari segi masyarakat secara luas (Rezaee & Fogarty, 2019). Dengan demikian, strategi bisnis yang berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada reputasi perusahaan, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip *stewardship* dalam pengelolaan sumber daya dan bisnis. Para pihak yang berkepentingan perlu

memberikan dukungan keberlangsungan jangka panjang dengan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan serta menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait keberlanjutan yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang tertulis di Bab IV Pasal 10 dijelaskan bahwa para entitas tersebut diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan setiap tahunnya dengan disusun secara terpisah dari laporan tahunan (OJK, 2017). Namun, pada kenyataannya sejak peraturan ini diberlakukan masih terdapat perusahaan yang tidak membuat dan melaporkan kewajibannya dengan menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya pemerintah Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap peraturannya yang tertuang pada Bab V Pasal 13, yaitu para entitas tersebut hanya dikenakan sanksi berupa teguran atau peringatan semata (OJK, 2017). Dalam konteks ini, kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dapat mencerminkan ketidakpedulian mereka terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini bisa menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mungkin lebih memperhatikan keuntungan jangka pendek daripada tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketidakpatuhan ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran dari para pemangku kepentingan, seperti investor dan konsumen, yang mungkin menilai bahwa perusahaan tersebut tidak menghargai nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan dan dapat menurunkan nilai perusahaan mereka. Begitu pun sebaliknya, pembuatan laporan keberlanjutan dapat memberikan hal yang baik terhadap nilai perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait sosial dan lingkungan, serta memperkuat citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keberlanjutan yang kuat dapat membuka pintu bagi akses modal dan investasi yang lebih besar, sambil mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Pelaporan keberlanjutan juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan. Dengan mengungkapkan secara terbuka dampak lingkungan dan sosial mereka, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dan membantu tujuan keberlanjutan secara global. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan transparansi dan akuntabilitas, jelaslah bahwa pelaporan keberlanjutan akan memberikan peran yang sangat dibutuhkan dalam membentuk nilai dan persepsi perusahaan. Oleh karena itu, memasukkan metrik dan pengungkapan keberlanjutan ke dalam kerangka kerja pelaporan perusahaan tidak hanya merupakan langkah strategis tetapi juga merupakan elemen fundamental dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai dan relevansi jangka panjang perusahaan.

Pada tahun 2023, PWC menerbitkan Laporan Asia Pacific Sustainability Counts II dan juga memaparkannya pada artikel yang berjudul “Tren dan Arah Sustainability Report Indonesia di Masa Mendatang”. Pada laporan dan artikel yang dirilis, dijelaskan bahwa pengungkapan risiko dan/atau peluang terkait iklim

perusahaan meningkat dari 77% pada tahun 2021 menjadi 88% pada tahun 2022 (PWC, 2023). Di berbagai yurisdiksi di kawasan Asia Pasifik, 80% perusahaan yang diteliti salah satunya Indonesia pada tahun 2022 mengadopsi *GRI Standards*. Tingkat pengungkapan tanggung jawab dewan direktur juga meningkat dari tahun 2021 hingga 2022. Indonesia merupakan negara yang mengalami terjadinya peningkatan signifikan dalam penggunaan Standar GRI, dari 36% pada tahun 2021 meningkat 96% pada tahun 2022 (PWC, 2023). Hal ini menunjukkan komitmen yang semakin meningkat dari pihak manajemen atas isu-isu keberlanjutan. Data ini memberikan gambaran positif tentang arah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam memastikan bahwa pengungkapan dan komitmen terhadap keberlanjutan tidak hanya menjadi pencapaian formal, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata dan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat.

Menjaga kepercayaan laporan dan meningkatkan reputasi perusahaan adalah hal krusial dalam dunia bisnis modern (Amalia & Firmansyah, 2022; Verawati, 2020). Maka dari itu dibutuhkan sebuah asuransi atau penjaminan atas laporan yang telah dibuat untuk menciptakan atau menambah kredibilitas dari suatu laporan. Tidak hanya laporan keuangan saja yang butuh di audit, laporan keberlanjutan pun juga sama perlu dilakukan *assurance*. Asuransi atas laporan keberlanjutan (*sustainability assurance*) bisa dikerjakan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal tetapi ada juga laporan keberlanjutan yang tidak di *assure*.

Sustainability assurance memainkan peran penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan informasi keberlanjutan yang diungkapkan oleh organisasi (Simnett, 2012). Melalui verifikasi dan penilaian independen, jaminan laporan keberlanjutan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan atas data yang dilaporkan dan komitmen organisasi terhadap praktik-praktik keberlanjutan (Manetti & Becatti, 2009). Hal ini membantu organisasi membangun sistem yang tepat untuk pengumpulan, agregasi, dan analisis data (Puspita, 2022). Selain itu, laporan keberlanjutan yang terjamin (*sustainability assurance*) membantu mengidentifikasi kesenjangan dan kekurangan dalam praktik saat ini, yang memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka (Zorio et al., 2013). Dengan mengadopsi seperangkat standar pelaporan keberlanjutan yang kuat dan berkualitas tinggi, organisasi dapat memperkuat proses asurans mereka dan meningkatkan kejelasan dan fokus pada peran dan tugas manajemen dan direksi yang terlibat dalam keterlibatan asurans. Hal ini menunjukkan bahwa praktik asurans laporan keberlanjutan (*sustainability assurance*) dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kinerja keberlanjutan organisasi.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Puspita (2022), Lestari & Astuti (2023) dan Loh et al. (2017) mengungkapkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan yang dijadikan sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang dijadikan sebagai variabel dependen. Namun, bertentangan dengan temuan yang diteliti oleh Andayani (2021), Fadillah & Noormansyah (2023), Mengko et al. (2022) dan Astari et al. (2023) dimana

menjelaskan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kemudian, penelitian tentang penjaminan laporan keberlanjutan (*sustainability assurance*) masih cukup terbatas jika dikaitkan dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Studi sebelumnya dari Harymawan et al. (2020) menghasilkan adanya dampak positif dari *sustainability assurance* dengan nilai perusahaan. Kemudian, studi dari Dhiva & Gunawan (2023) menunjukkan dampak negatif pada variabel dependen yang lain. Hasil penelitian yang lain yang dilakukan oleh Sellami & Hlima (2019) mengungkapkan bahwa permintaan asuransi atas laporan keberlanjutan dapat mendorong ketersediaan informasi yang dapat diandalkan, dimana hal ini mampu mengurangi asimetri informasi. Selanjutnya, penelitian jika penjaminan dijadikan sebagai variabel moderasi juga terbilang masih cukup terbatas, Anisa & Nikmah (2023) mengungkapkan bahwa asuransi eksternal tidak memoderasi pengaruh keberlanjutan kualitas pelaporan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyadari adanya beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya terkait ukuran sampel, representasi geografis, dan kelangkaan penelitian tentang hal ini, sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut terkait topik ini agar dapat mengatasi aspek-aspek tersebut yang berjudul **“PENGARUH PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENJAMINAN LAPORAN KEBERLANJUTAN SEBAGAI MODERASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada konteks di atas, mengarahkan pada perumusan masalah yang disajikan sebagai berikut:

- 1) Apakah pengungkapan laporan keberlanjutan memengaruhi nilai perusahaan?
- 2) Apakah penjaminan laporan keberlanjutan memengaruhi nilai perusahaan?
- 3) Apakah penjaminan laporan keberlanjutan dapat memoderasi hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dengan nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya mengarahkan pada disusunnya beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.
- 2) Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh penjaminan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.
- 3) Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh penjaminan laporan keberlanjutan dalam memoderasi pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau pengetahuan dan pengambilan keputusan bagi beberapa pihak, seperti:

- 1) Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai hubungan atas pengungkapan laporan keberlanjutan

dengan nilai perusahaan, serta peran penjaminan laporan keberlanjutan sebagai variabel moderasi. Ini dapat membantu mengisi celah pengetahuan dalam bidang ini dan memperkaya literatur akademis tentang keberlanjutan dan nilai perusahaan (*firm value*).

- 2) Bagi para investor, penelitian ini memberikan informasi kepada investor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi yang terbaik, karena mereka dapat menggunakan informasi tentang keberlanjutan perusahaan sebagai salah satu faktor dalam mengevaluasi potensi investasi.
- 3) Bagi para peneliti, penelitian menawarkan inspirasi dan arah untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini. Mereka dapat memperluas pengetahuan tentang pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan dengan mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor moderasi potensial lainnya. Ini dapat membuka pintu untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang dampak keberlanjutan pada kinerja perusahaan dan nilai pasar.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali sektor finansial, karena sektor tersebut mempunyai regulasi yang ketat dan risiko yang berbeda.
- 2) Penelitian menggunakan tahun observasi dari 2020 sampai dengan 2022.
- 3) Penelitian ini secara spesifik menggunakan proksi *tobins'Q* untuk menganalisa nilai perusahaan.